

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam tertib perundang - undangan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggung jawaban dari yang memerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi perorangan atau kelompok atau melainkan harus melindungi hak asasi tersebut.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan dan aspirasinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar sebuah negara, maka partai politik merupakan perlembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum.

Menurut Sunatra (2016, hlm. 348) menjelaskan bahwa partai politik merupakan instrumen negara demokrasi dan merupakan parameter berhasil atau tidak berkualitasnya penyelenggaraan negara. Hal ini seperti ditegaskan Michael tentang parameter negara demokrasi yaitu; prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemelihan umum yang demokratis, federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal (distribusi kekuasaan), pembuatan undang-undang, sistem peradilan independen, kekuasaan lembaga kepresidenan, peran media yang bebas, peran kelompok-kelompok kepentingan hak masyarakat untuk tahu, melindungi hak-hak minoritas dan kontrol sipil atas militer.

Dewasa ini, masyarakat berpandangan bahwa politik itu adalah hal yang buruk karena, masyarakat disuguhi oleh kenyataan-kenyataan yang dirasakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan seperti: adanya politik uang, para pemangku jabatan yang saling menjegal satu sama lain tanpa mengindahkan adanya etika dan norma. Pernyataan tersebut diilhami dari suatu jurnal yang pernah diterbitkan oleh Anton Yuliono Tahun 2013 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul kepercayaan masyarakat pada partai politik dihalaman 174 yang menyebutkan masyarakat golongan putih (tidak menggunakan hak pilih) merupakan trend politik di Indonesia akhir-akhir ini, berbagai pelaksanaan pemilihan presiden memperlihatkan tingkat golongan putih yang cukup tinggi, antara 35-45% terutama pilkada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hal ini sangat dipengaruhi oleh:

1. Paradigma buruk bahwa partai politik hanya memikirkan kekuasaan
2. Partai politik dianggap tidak dapat menampilkan/menawarkan calon pemimpin terbaik bagi masyarakat

3. Partai politik tidak mendewasakan masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang dilarang seperti memunculkan isu yang tidak baik kepada masyarakat terkait kompetitor calon maupun partai lain untuk mendongkrak elektabilitas calon yang diusungnya dalam pemilihan umum.

Hal tersebut diperburuk oleh para figur calon pemimpin dan pemimpin yang sudah terpilih memiliki perilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Oleh sebab itu, masyarakat pada akhirnya enggan untuk memperlajari pendidikan politik sehingga warga negara kurang terdidik dalam hal politik. Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Di Indonesia peran partai politik adalah sebagai pilar penyangga demokrasi. Dalam artian bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif.

Dengan kondisi partai politik yang sehat dan efektif, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Sejalannya dengan keberadaan partai politik sebagai salah satu saluran pendidikan politik. Penulis ingin menampilkan hal-hal yang telah diusahakan oleh partai politik dalam menjawab permasalahan-permasalahan terkait pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Karena menurut pandangan penulis Partai GERINDRA telah sukses menarik perhatian dari kalangan pemuda.

Berdasarkan pantauan penulis di daerah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dimana penulis bertempat tinggal disana, pada pemilihan Gubernur Banten tahun 2017. Partai GERINDRA mendapatkan hasil perolehan suara yang cukup signifikan dimana pasangan calon nomor urut 1 Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumy diusung oleh 7 partai politik salah satunya yaitu partai GERINDRA. Dapat dilihat dari antusiasme pemuda yang sangat tertarik dalam menghadiri kampanye yang dilakukan oleh partai GERINDRA yang mengusung pasangan Wahidin Halim dan Andika

Hazrumy. Fakta inilah yang membuat penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul “Peran Pendidikan Politik Partai GERINDRA di Kalangan Pemuda Studi Deskriptif di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai beriku :

1. Tingkat kepercayaan kalangan pemuda terhadap partai politik masih rendah
2. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan politik
3. Kurang jelasnya pendidikan politik bagi masyarakat
4. Banyaknya masyarakat belum mendapatkan pendidikan politik yang baik
5. Inskonsistensinya para kader partai politik dalam mempraktikan budaya politik
6. Kurangnya peran dari pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Partai GERINDRA dalam melakukan pendidikan politik di kalangan pemuda Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang?
2. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pendidikan politik Partai GERINDRA di kalangan pemuda Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang?
3. Apa upaya Partai GERINDRA untuk mengatasi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan politik dikalangan pemuda?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti membatasi masalah pada peranan Partai GERINDRA bagi kalangan pemuda di wilayah Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yang melakukan pendidikan politik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk lebih meningkatkan kepedulian para partai politik terlebih khusus partai gerindra agar lebih peka dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya pendidikan politik dikalangan pemuda. Kepekaan tersebut diharapkan dapat membantu secara proaktif kepada kalangan pemuda yang apatis terhadap perpolitikan yang dapat mengganggu atau menghambat budaya demokrasi di indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menjawab masalah yang dihadapi partai GERINDRA dengan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mendapatkan pengetahuan atau teori baru tentang pendidikan politik.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemuda

Meningkatkan motivasi dan partisipasi pemuda akan pentingnya pendidikan politik.

b. Manfaat bagi Partai Politik

Membuat terobosan baru dalam merumuskan dan menjabarkan program kerjanya yang berkaitan dengan pemberian pendidikan politik dikalangan pemuda.

c. Manfaat bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang peran partai politik, terutama terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik dikalangan pemuda.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat penjelasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Soekanto (2009, hlm. 212-213) menjelaskan, “Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.
2. Menurut Sudirman N (1992, hlm. 4) berpendapat bahwa “Pendidikan adalah sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental”.
3. Menurut Abernethy dan Coombe (1965, hlm. 287-289) menerangkan, “*education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan) adalah hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pemebentukan sikap (*group attitudes*), masalah pengangguran (*unemployment*), dan peranan politik kaum cendikia (*the political role of the intelligentsia*). Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi”.
4. Menurut Rusadi Kartaprawira (dalam Sunatra, 2016, hlm. 43-44) mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik meliputi *political education, political socialization, citizenship training* yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara dan akhirnya warga negara melek politik. Rusadi Kartaprawira menyarankan agar pendidikan politik dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan

pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan

5. Menurut Carl J. Friedrich (dalam prof. Miriam Budiardjo, 2008, hlm. 404) menjelaskan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil seta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the futher objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*)

H. Sistematika Skripsi

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan penelitian disajikan dalam sistematika skripsi berikut dengan pembahsannya. Sistematika skripsi penelitian ini disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan latar belakang penelitian berkaitan dengan kesenjangan harapan dan fakta di lapangan , identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.

b. Bab II Kajian Teori

Bab II ini berisi tentang kajian teori (mengenai variabel penelitian yang diteliti), Analisi dan pengembangan materi yang diteliti (mencakup keluasan dan kedalaman materi, karakteristik materi, bahan dan media, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab III ini berisi tentang deskripsi mengenai metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan tentang hasil dan temuan penelitian (mendeskripsikan hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang diterapkan), pembahasan penelitian (membahas tentang hasil dari temuan penelitian).

e. Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini menyajikan simpulan terhadap hasil analisis temuan dari penelitian dan saran penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil analisis temuan peneliti.